

Analisis Upaya Indonesia Dalam Menangani Pembebasan WNI Dari Kelompok Terorisme Abu Sayyaf

Vetra Raisha¹, Ayu Maruti², Bella Widya³ Junior Chavin Megawanto⁴, Tiffany Setyo Pratiwi⁵

¹⁻⁵Universitas Teknologi Yogyakarta

Korespondensi penulis: ayumaruti78@gmail.com*

Abstract. *Abu Sayyaf is a separatist group originating from the Philippines with headquarters in Western Mindanao, Basilan, Jolo and Sulu. The existence of the Abu Sayyaf is trying to build the Islamic Mindanao Islamic State (MIS). Abdurrajak Janjalani is the leader of the Abu Sayyaf which is affiliated with the Al Qaeda terrorist network. The Abu Sayyaf's actions are considered extreme and disturbing the people of the Philippines and the Southeast Asian region. The footprints built by the Abu Sayyaf tend towards radicalism and acts of terrorism. The Abu Sayyaf carries out many bombings and kidnappings and has expanded into maritime areas by pirating ships. Indonesia became one of the countries that fell victim to piracy in 2016 when the barge Anand 12 and tugboat Brahma 12 were hijacked while traveling to Batangas, Southern Philippines. The aim of the piracy was so that the Abu Sayyaf could receive ransom money to fund their struggle. The Indonesian government has made various efforts to free Indonesian citizens who are being held hostage. The Indonesian government is prioritizing the negotiation route in this case. Indonesia is coordinating with the Philippine government, involving non-state actors in carrying out a social approach. The involvement of non-government actors is an opening to build dialogue with the Abu Sayyaf until the negotiation process is successful.*

Keywords: *Abu Sayyaf, Terrorism, Non-Governmental Actors, Ship Pirates, Indonesian Negotiation*

Abstrak. Abu Sayyaf merupakan kelompok separatisme yang berasal dari Filipina yang bermarkas di sebelah Barat Mindanao, Basilan, Jolo dan Sulu. Eksistensi Abu Sayyaf berusaha membangun Islam Mindanao Islamic State (MIS). Abdurrajak Janjalani adalah pemimpin Abu Sayyaf yang terafiliasi dengan jaringan teroris Al Qaeda. Aksi Abu Sayyaf terbilang ekstrem dan meresahkan masyarakat Filipina serta regional Asia Tenggara. Jejak yang dibangun oleh Abu Sayyaf bertendensi ke arah radikal dan tindakan terorisme. Abu Sayyaf banyak melakukan pengeboman dan penculikan dan telah meluas ke wilayah maritim dengan melakukan perompakan kapal. Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi korban perompakan pada tahun 2016 ketika Kapal Tongkang Anand 12 dan Kapal Tunda Brahma 12 dibajak saat melakukan perjalanan menuju Batangas Filipina Selatan. Tujuan perompakan tersebut agar Abu Sayyaf mendapat uang tebusan untuk dana perjuangan mereka. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk membebaskan WNI yang disandera. Pemerintah Indonesia mengedepankan jalur negosiasi dalam kasus ini. Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah Filipina, melibatkan aktor non negara dalam melakukan pendekatan sosial. Keterlibatan aktor non pemerintah menjadi celah untuk membangun dialog dengan Abu Sayyaf hingga proses negosiasi berhasil dilakukan.

Kata Kunci: Abu Sayyaf, Terorisme, Aktor Non Pemerintah, Perompak Kapal, Negosiasi Indonesia

LATAR BELAKANG

Konflik dapat diartikan sebagai segala bentuk interaksi yang bertentangan atau antagonistik antara dua pihak atau lebih, konflik organisasi adalah perselisihan yang timbul antara dua atau lebih anggota atau faksi dalam suatu organisasi. Hal ini muncul karena adanya kenyataan nyata bahwa mereka harus berbagi sumber daya dan aktivitas kerja yang terbatas, hanya karena mereka memiliki perbedaan dalam status, tujuan, nilai atau persepsi. Konflik selalu mewarnai kehidupan kita, mulai dari perselisihan kecil hingga perselisihan besar. Perbedaan persepsi dan pendapat serta perbedaan kepentingan seringkali menimbulkan

konflik. Solusi untuk beberapa konflik mungkin dapat dicapai secara meyakinkan, sementara konflik lainnya dapat diselesaikan sebagian. Akan tetapi, ada beberapa kasus di mana penyelesaian masih sulit dicapai dan memperpanjang perselisihan tanpa batas waktu. Menurut Killman dan Thomas (1978), konflik mencerminkan situasi ketidakselarasan di antara tujuan pribadi yang diinginkan oleh seseorang, baik secara individu maupun dalam interaksi dengan orang lain. Kondisi ini memiliki potensi untuk menyebabkan ketegangan emosional yang dapat berujung pada tingkat stres, sehingga dapat menghambat efisiensi dan produktivitas dalam lingkungan kerja (Wahyudi, 2015).

Konflik-konflik yang tidak terselesaikan seringkali memicu gerakan-gerakan radikal yang mengeksploitasi situasi-situasi tersebut untuk mendapatkan empati sambil merancang aksi-aksi terorisme secara metadis; didefinisikan sebagai tindakan yang disengaja secara individu atau kolektif yang menggunakan kekerasan yang memicu suasana teror yang memicu ketakutan di seluruh ranah publik dengan melanggar kebebasan mereka – memusnahkan kehidupan, harta benda; menyebabkan kerusakan besar bahkan korban jiwa secara massal (Tim Hukumonline, 2023). Ada beberapa bentuk dari terorisme yakni terorisme politik, terorisme non politis, Quasi terorisme, Terorisme politik terbatas, Terorisme negara atau pemerintahan. Tindakan terorisme seringkali terhubung dengan kelompok-kelompok militan yang terkenal karena tindakan teror mereka. Salah satunya yakni Kelompok Abu Sayyaf yang beroperasi di Filipina

Abu Sayyaf Group (ASG) merupakan kelompok radikal yang sering beraktivitas di wilayah segi empat di Laut Sulu, sebagian besar berbasis di wilayah selatan Filipina. Ruang lingkup operasional kelompok ini terbentang dari garis pantai timur laut Pulau Kalimantan hingga pulau-pulau besar di Kepulauan Filipina dan terbentang dari Pulau Palawan hingga Kepulauan Sulu. Proklamasi publik yang dilakukan oleh pendiri ASG Abdurajak Janjalani pada tahun 1993 menyatakan bahwa organisasi khusus ini muncul sebagai reaksi terhadap ketidakadilan, penindasan, dan tirani yang dirasakan oleh umat Islam yang tinggal di Filipina sejak awal berdirinya. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa faktor-faktor tersebut terus menjadi pembenaran atas keberadaan ASG. Awalnya bernama Al-Harakatul Islamiyyah setelah didirikan sekitar tahun 1993, kelompok ini memilih untuk mengubah nama dirinya secara terpisah dari Front Pembebasan Nasional Moro dan mengangkat senjata melalui peperangan mujahidin melawan orang-orang yang mereka anggap musuh keyakinan mereka—yang membuat mereka menggunakan nama mereka saat ini 'Abu Kelompok Sayyaf.' Namun, setelah mengambil tanggung jawab atas pengeboman kapal MV Doulos di Zamboanga City pada tahun 1991—suatu peristiwa yang menimbulkan kerusakan yang tak terhapuskan—Angkatan

Bersenjata dan Kepolisian Nasional Filipina secara resmi mencap ASG sebagai faksi teroris aktif. Dari tahun 1991 hingga 1996, ASG bertransisi menjadi "kelompok teroris Islam" setelah terbentuknya koneksi dengan Al-Qaeda. Kelangsungan hidup kelompok ini dipastikan dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap taktik etnis Moro yang digunakan di Filipina untuk mencapai tujuan mereka; yaitu upaya mereka untuk mencapai kemerdekaan. Pada tahun 1996 hingga 2003, ASG beralih menjadi sebuah kelompok bandit. Terlebih setelah kematian pemimpin mereka pada saat itu, Abdurajak Janjalani di tahun 1998. Langkah-langkah pemberantasan terorisme yang dilakukan pemerintah Filipina berhasil menghambat aliran dana untuk kegiatan teroris. Sejak tahun 1991 hingga tahun 2000, terdapat sebanyak 378 kasus terorisme -- seperti pengeboman, penyergapan, dan penggerebakan -- yang dilakukan oleh Kelompok Abu Sayyaf (ASG). Dalam jangka waktu yang sama, ASG juga melakukan sekitar 640 penculikan yang melibatkan total 2.076 individu dengan tuntutan uang tebusan sebagai sumber pendapatan utama mereka (Dewi, 2020)

Kelompok ini juga mengintensifkan kerja sama, berbagi dana dan keahlian dengan kelompok militan di kawasan Asia Tenggara seperti Jamiah Islamiyah (JI), sehingga memberdayakan mereka untuk melakukan aksi terorisme dalam skala yang lebih besar. Kemudian nama ASG kembali naik pada 26 Maret 2016 ketika mereka melakukan penyanderaan 10 orang anak buah kapal (ABK) Brahma 12 dan tongkang Anand 12 yang mempunyai kewarganegaraan Indonesia dan membawa 7.000ton batubara yang bertolak dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan menuju Filipina. Kapal Tunda Brahma 12 sudah dilepaskan dan sudah aman dibawah naungan pemerintah Filipina. Tetapi, Kapal Anand dengan 10 ABK WNI masih berada dibawah kendali Abu Sayyaf Group di wilayah Filipina. Pihak penyandera meminta tebusan uang 50 juta peso atau jika dirupiahkan maka setara 14-15 miliar dengan tenggat waktu hingga 31 Maret 2016 (Pujayanti, 2016).

Ini bukan kali pertama bagi Indonesia warganya disandera kelompok separatis. Namun keberhasilan upaya pemerintah Indonesia dalam membebaskan sandera kelompok Abu Sayyaf patut untuk diperbincangkan karena eksekusinya yang luar biasa. Sepuluh awak kapal WNI yang disandera berhasil dibebaskan kurang dari tiga bulan setelah kapal mereka dibajak, dilakukan tanpa pembayaran uang tebusan dan tanpa bentrokan bersenjata. Sehingga dalam paper ini, penulis akan membahas apa saja upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam menangani pembebasan WNI dari kelompok terorisme Abu Sayyaf.

KAJIAN TEORITIS

Dalam menganalisa kasus yang terjadi terhadap ABK Indonesia yang disandera oleh kelompok terorisme Abu Sayyaf, penulis menggunakan beberapa teori untuk menjelaskan hal tersebut.

1. Terorisme

Terorisme merupakan ancaman global yang termasuk aksi kekerasan dengan melibatkan suatu individu tertentu maupun kelompok-kelompok yang tujuannya itu untuk menciptakan rasa takut, kehebohan, serta mengacaukan stabilitas di suatu negara dan masyarakatnya. Berdasarkan ketentuan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, terorisme merupakan sebuah tindakan yang dilancarkan oleh suatu kelompok atau individu individu tertentu dengan menggunakan cara kekerasan atau mengancam, yang kemudian menciptakan suasana teror atau rasa takut secara meluas, dengan menyebabkan korban yang bersifat massal, serta merusak atau menghancurkan objek vital yang strategis, lingkungan hidup, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan (Ramadhan & Ridwan, 2020). Definisi terorisme sendiri sudah menjadi topik yang kontroversial, karena sulit untuk menentukan batasan antara tindakan terorisme dan tindakan kekerasan lainnya seperti perang atau pemberontakan. Namun, umumnya terorisme sendiri dipahami sebagai tindakan yang bersifat destruktif yang dilakukan oleh kelompok-kelompok atau individu yang melanggar ketentuan hukum, dan bertujuan untuk menciptakan ketakutan dan merusak stabilitas negara atau masyarakat. Faktor penyebab terorisme dapat bervariasi, antara lain ideologi, sosial-ekonomi, dan politik. Faktor ideologi misalnya ekstremisme agama atau politik, sedangkan faktor sosial-ekonomi seperti kemiskinan atau ketidakadilan sosial.

2. Teori *Peace Building Pyramid*

Peace-Building Pyramid adalah sebuah teori yang menggambarkan tiga tingkatan intervensi yang dapat dilakukan untuk membangun perdamaian dan menyelesaikan konflik secara berkelanjutan (Maiese, 2017). Teori ini dikembangkan oleh John Paul Lederach, yang adalah seorang ahli perdamaian dan konflik internasional yang telah banyak memberikan kontribusi dalam bidang tersebut. *Peace-Building Pyramid* menawarkan tiga tingkatan atau level intervensi yang dapat dilakukan untuk membangun perdamaian dan menyelesaikan konflik secara berkelanjutan. Ketiga tingkatan tersebut adalah *top elite*, *middle-range*, dan *grassroots*.

Level pertama, *Top elite* adalah tingkat teratas dari hierarki intervensi. Level ini melibatkan partisipasi aktif dari pemimpin politik, ekonomi, dan sosial dalam proses perdamaian. Top elite bertugas untuk merancang kebijakan dan strategi yang akan membawa

konflik ke arah perdamaian. Pada tingkat ini, para pemimpin harus memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam konflik serta mencari solusi yang saling menguntungkan bagi setiap pihak.

Level kedua, *middle-range* adalah tingkat menengah yang melibatkan kelompok-kelompok yang memiliki pengaruh signifikan dalam masyarakat, seperti organisasi masyarakat sipil, kelompok agama, dan media massa. Tugas dari *middle-range* adalah untuk memobilisasi dukungan dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses perdamaian. Kelompok-kelompok ini dapat membantu menyebarkan informasi tentang perdamaian dan membangun opini publik yang positif tentang perdamaian. Kelompok-kelompok ini juga dapat memperkuat jaringan sosial dan membangun hubungan antar kelompok yang harmonis.

Level ketiga, yaitu *grassroots* adalah tingkat bawah yang melibatkan partisipasi langsung dari masyarakat dalam proses perdamaian suatu konflik. Tugas *grassroots* adalah membangun kapasitas masyarakat dalam menyelesaikan konflik secara damai dan memperkuat hubungan antar kelompok. Pada level ini, masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam proses perdamaian serta harus diberdayakan untuk dapat memahami masalah yang ada dalam suatu konflik yang terjadi dan mencari solusi yang dapat diterima untuk kepentingan bersama.

3. *Alternative Dispute Resolution*

Alternative Dispute Resolution (ADR) atau Penyelesaian Sengketa Alternatif adalah cara penyelesaian sengketa atau konflik yang penyelesaiannya tidak melalui jalur pengadilan, namun melalui cara-cara seperti mediasi, arbitrase, negosiasi, dan konsiliasi. Tujuan dari ADR adalah untuk mencapai penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan efisien. Dalam ADR, pihak yang bersengketa diharapkan dapat mencapai kesepakatan secara damai dan saling menguntungkan. Secara sosiologis, model penyelesaian ini berbasis nilai-nilai budaya Indonesia yaitu penyelesaian suatu konflik atau sengketa dengan jalan damai yang telah menjadi budaya masyarakat Indonesia seperti musyawarah mufakat (Triana, 2019).

Salah satu jenis ADR adalah negosiasi, yang merupakan cara penyelesaian sengketa dengan cara berunding antara kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan. Negosiasi dapat dilakukan baik itu secara langsung antara kedua belah pihak yang berkonflik ataupun melalui pihak ketiga atau perantara. Tujuan dilaksanakannya negosiasi adalah untuk mencapai suatu kesepakatan yang dapat diterima oleh setiap pihak dan juga dapat saling menguntungkan bagi kepentingan pihak-pihak yang berkonflik.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah studi literatur yang didapat dari karya ilmiah yang mencakup pembahasan mengenai upaya Indonesia dalam menangani pembebasan WNI dari kelompok terorisme Abu Sayyaf. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder dengan melakukan pengumpulan studi pustaka kemudian diolah dengan metode kualitatif untuk menjawab judul yang kami buat. Terdapat 3 teori dalam pembahasan yang diangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Penyanderaan WNI oleh Kelompok Abu Sayyaf

Abu Sayyaf Group (ASG) atau Kelompok Abu Sayyaf merupakan salah satu kelompok yang terorisme besar di wilayah Asia Tenggara yang memberontak melawan pemerintah sebagai kelompok penjahat transnasional. Sebagai kelompok yang besar, hal yang menjadi tujuan prioritas dari kelompok ini yaitu membangun sebuah negara yang merdeka berdasarkan dari ketentuan dan hukum-hukum dari Syariah Islam, yang mana hal ini menjadi dasar dari otoritas undang-undang negara tersebut. Hukum syari'ah ini kemudian akan diimplementasikan dan ditaati oleh warga negara yang tinggal di negara yang dibentuk kelompok ini. Tempat beroperasinya berada di wilayah sekitar provinsi kepulauan Sulu dan kepulauan Basilan, dan di semenanjung Zamboanga di barat Mindanao Filipina Selatan. Sejak tahun 1990-an sampai dengan awal tahun 2000-an kelompok abu Sayyaf telah terlibat dalam 378 lebih tindakan terorisme seperti aksi pembunuhan, penculikan, penyerangan dan pengeboman yang telah mengakibatkan korban jiwa warga sipil sebanyak 280.

Pada tahun 2016, kelompok terorisme Abu Sayyaf kembali beraksi dengan menyandera WNI tepatnya pada tanggal 26 Maret 2016. Penyanderaan ini meliputi 2 kapal yaitu Kapal Tongkang Anand 12 dan Kapal Tunda Brahma 12. Kedua kapal tersebut dibajak saat melakukan perjalanan menuju wilayah Batangas Filipina Selatan yang awalnya berlabuh dari Sungai Puting Kalimantan Selatan yang mengangkut sebanyak 7000 ton batu bara. Salah satu kapal yaitu Kapal tunda Brahma 12 telah berhasil dibebaskan dari kelompok tersebut dan ditangani langsung Pemerintah Filipina. Sedangkan, kapal yang mengangkut 10 anak buah kapal (ABK) yang berstatus WNI yaitu Tongkang Anand 12 masih berada dibawah kendali kelompok teroris di wilayah Filipina. Pihak penyandera yakni kelompok Abu Sayyaf minta tebusan dengan tenggat waktu sampai dengan tanggal 31 Maret 2016, dengan jumlah tebusan yang diminta sebanyak 50 juta peso atau sama dengan Rp 15 miliar. Aksi terorisme kelompok

Abu Sayyaf, selain karena motif finansial juga dilandaskan penentangan yang bersifat ideologis, sehingga dibutuhkan penanganan yang seksama.

Adapun jumlah WNI yang disandera oleh kelompok ini sebanyak 10 orang. Berikut daftar nama-nama WNI yang disandera kelompok teroris Abu Sayyaf.

1. Mahmud (Banjarmasin, Kalimantan Selatan)
2. Julian Philip (Todang Utara, Minahasa)
3. Alvian Elvis Peti (Tanjung Priok, Jakarta)
4. Peter Tonsen Barahma (Batu Aji, Batam)
5. Suriyanto (Gilireng Wajo, Sulawesi Selatan)
6. Suriansyah (Kendari, Sulawesi Tenggara)
7. Reynaldi (Makassar, Sulawesi Selatan)
8. Wendi Raknadian (Padang, Sumatera Barat)
9. Wawan Saputra (Palopo, Sulawesi Selatan)
10. Bayu Oktavianto (Klaten, Jawa Tengah)

Berbeda dengan kasus penyanderaan yang pernah dilakukan oleh kelompok teroris Abu Sayyaf yang terjadi di Somalia, dimana Indonesia menggunakan pilihan militer secara langsung untuk membebaskan para sandera karena tidak adanya keterlibatan aktif dari pemerintahan di Somalia. Dalam kasus yang melibatkan sebanyak (10) sepuluh warga Indonesia yang disandera oleh kelompok teroris ini, pihak dari pemerintahan di Filipina yang aktif tidak memberikan izin kepada Indonesia untuk melakukan operasi militer di wilayahnya. Oleh karena itu, sebagai wujud menghargai otoritas antar negara maka Indonesia tidak memilih opsi operasi militer untuk membebaskan sandera WNI di wilayah teritori kawasan maritim Filipina

Upaya Pemerintah Indonesia dalam Membebaskan Sandera WNI

Dalam konflik yang terjadi pada penyanderaan warga negara Indonesia yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf, Indonesia mencoba dengan menyelesaikan dengan mengutamakan jalan Diplomasi. Khususnya dengan cara bernegosiasi Dimana pihak pihak yang terlibat memiliki hubungan timbal balik dan bisa memutuskan dengan memberi dan menerima perubahan. Seperti apa yang dikatakan oleh Presiden Indonesia yaitu Jokowi yang meminta untuk mengutamakan jalur diplomasi yang didukung oleh intelijen TNI. Maka dari itu kementerian luar negeri melakukan beberapa pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu meningkatkan hubungan politik dengan pemerintah Filipina dengan membuka komunikasi untuk meminta membawa pasukan

militer Indonesia kedalam Filipina demi menyelamatkan sandera warga negara Indonesia. Namun Filipina menolak karena ia merasa terancam keselamatan warganya apabila Indonesia harus mengirim pasukan militernya. Pada akhirnya Indonesia mencoba dengan menjalin komunikasi untuk mengupayakan pembebasan sandera warga negara Indonesia dengan maksimal.

Indonesia juga meminta agar Filipina bisa mendukung Indonesia untuk menyelamatkan sandera tersebut dari kelompok Abu Sayyaf. Presiden Jokowi juga ikut turut andil dalam Upaya penyelamatan warga negara Indonesia yang disandera dengan berbicara langsung pada pemerintah Filipina untuk bisa menjamin keselamatan para warga negara Indonesia yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf. Indonesia juga mencoba mengerti alasan dari penolakan Filipina yang tidak ingin Indonesia membawa pasukan militer karena ia merasa terancam keselamatan warganya. Maka dari itu Indonesia terus melakukan komunikasi intensif dengan Filipina, sebab hanya dengan cara ini Indonesia bisa mendapatkan informasi tentang keadaan warga negara Indonesia yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf.

Kemudian Indonesia merasa bahwa kasus penyanderaan ini ternyata sudah terlalu lama, walaupun Indonesia telah mendapatkan kabar bahwa kelompok Abu Sayyaf akan membebaskan sandera secepatnya. Tetapi Indonesia merasa khawatir karena semakin lama penyanderaan ini khawatir akan membahayakan para sandera warga negara Indonesia. Pemerintah Indonesia juga merasa bahwa Filipina kurang tegas dalam menangani kasus penyanderaan ini. Kementerian luar negeri Indonesia akhirnya meminta dialog Kembali dengan pemerintah Filipina secara formal untuk menegaskan Filipina agar segera bertindak dalam membantu Indonesia membebaskan sandera warga negara Indonesia. Pada dialog tersebut juga membahas mengenai keamanan di Laut Sulu, Dimana perairan tersebut merupakan jalan lalu lintas para negara untuk melakukan perdagangan dengan Filipina, sebab pasokan batu bara Filipina hampir 96% berasal dari Indonesia, oleh karena itu Indonesia merasa perlu membicarakan terkait keamanan Laut Sulu tersebut agar tidak terjadi lagi kasus penyanderaan ini dimasa yang akan datang.

Dengan strategi dialog ini menciptakan kesepakatan untuk bertindak tegas dalam mengupayakan pembebasan para sandera warga negara Indonesia. Filipina kemudian bertindak dengan melakukan operasi militer di lokasi markas kelompok Abu Sayyaf pada 9 April 2016. Tetapi operasi tersebut malah membawa korban menewaskan tentara Filipina sebanyak 18 orang serta 53 orang luka luka. Itu terjadi karena posisi kelompok Abu Sayyaf yang berada di dataran tinggi sedangkan para tentara Filipina di dataran rendah dan membuat kelompok Abu Sayyaf dengan mudah menyerang para tentara Filipina. Kemudian Indonesia melakukan cara

informal dengan pendekatan pada tokoh Masyarakat maupun agama, karena Indonesia tidak ingin menggunakan kekuatan militer dalam penyelesaian kasus ini, sebab Indonesia khawatir kejadian operasi militer yang dilakukan oleh Filipina terulang kembali (Pujayanti, 2016).

Upaya Pemerintah Indonesia Melibatkan Aktor Non-Pemerintah

Upaya pembebasan sandera warga negara Indonesia selanjutnya pemerintah mencoba membuka jalur Informal dengan berkomunikasi langsung dengan tokoh Masyarakat dan bantuan dari PT PML yakni Perusahaan yang bergerak pada bidang operator kapan batu bara lalu dikoordinir oleh Kepala Densus 88 Mabes Polri. Mereka mencoba melakukan kontak langsung dengan ketua adat Pulau Sulu kemudian dari komunikasi tersebut ketua adat Pulau Sulu meminta pembayaran tebusan untuk warga negara Indonesia yang disandera.

Namun pemerintah menolak opsi pembayaran uang tebusan yang diminta oleh ketua adat Pulau Sulu. Karena pemerintah merasa opsi tersebut merendahkan harga diri bangsa yang berarti Indonesia menyerah dan mengikuti keinginan teroris. Maka dari itu pemerintah Indonesia tetap melakukan pendekatan Sosial dan Ekonomi serta dibarengi dengan operasi militer dalam bentuk penjagaan di perbatasan, tepatnya di Tarakan. Dengan membawa 5 kapal perang serta pasukan militer TNI Angkatan Laut sejumlah 500 orang. Hal ini dilakukan untuk penjagaan keselamatan para sandera (Gumilang, 2016).

Pemerintah Indonesia kemudian membentuk tim untuk melakukan pendekatan sosial dengan melibatkan warga Filipina yang bermayoritas muslim untuk menunjukkan bahwa Indonesia bukanlah musuh. Tim yang dibentuk oleh Indonesia dipimpin dengan Kivlan Zein seseorang seorang purnawirawan Mayor Jenderal sebab Kivlan sendiri memiliki relasi dengan pemimpin Moro atau MNLF yaitu Nur Misuari yang memiliki saudara yaitu Gubernur Sulu agar mengambil tindakan untuk membantu bernegosiasi dengan pimpinan Abu Sayyaf, Nur sendiri dilibatkan karena sang penculik dulunya merupakan mantan pengawal Nur Misuari. Dengan itu Kivlan sebagai pemimpin tim berhasil membuka komunikasi secara langsung dengan kelompok Abu Sayyaf. Dan Indonesia terus melakukan komunikasi secara intens untuk bernegosiasi dengan kelompok Abu Sayyaf agar segera membebaskan sandera warga negara Indonesia.

Kelompok Abu Sayyaf sendiri merupakan perkumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan untuk membangun negara Islam di Mindanao. Sehingga Indonesia berfikir untuk melakukan pendekatan sosial ekonomi dan berupaya untuk memberikan sumber daya yang dimiliki Indonesia untuk membuat pandangan Abu Sayyaf terhadap Indonesia itu positif dengan begitu ini akan memudahkan jalan negosiasi. Dapat diketahui bahwa keadaan

Masyarakat Filipina di wilayah Selatan sangat cukup tertinggal. Dengan Pendidikan yang memprihatinkan, Pembangunan yang tidak berjalan. Itu semua disebabkan karena adanya konflik yang berkepanjangan serta sering terjadi operasi militer kepada kelompok Abu Sayyaf. Sehingga ini membuat Filipina di wilayah Selatan sangat tertinggal dari segi Pembangunan hingga Pendidikan Masyarakat disana juga selalu merasa hidupnya tidak aman dan kesulitan.

Dari latar belakang tersebut membuat Indonesia mencoba mengambil Langkah untuk melibatkan tim dari Yayasan Sukma Dimana Yayasan tersebut memiliki sekolah yaitu Sekolah Sukma Bangsa yang bertepatan di Aceh. Yayasan Sukma dimiliki oleh Surya Paloh seorang ketua umum partai Nasional Demokrat. Kemudian Ahmad Baidowi sebagai kepala pemimpin Sekolah Sukma Bangsa di Aceh bersama rekannya yaitu Rizal Panggabean untuk melakukan negosiasi secara langsung dengan kelompok Abu Sayyaf agar dapat mengetahui lebih mudah langkah apa yang harus diambil untuk menangani kasus penyanderaan ini. Negosiasi ini dilakukan dengan tokoh Masyarakat dan Lembaga kemanusiaan Sulu.

Karena Yayasan Sukma telah melakukan Kerjasama pada bidang Pendidikan dengan pemerintah otonomi Moro Selatan hal tersebut membuat dialog di antara mereka begitu mudah. Setelah itu Tim Indonesia berupaya melakukan pendekatan sosial dengan menawarkan penawaran berupa beasiswa untuk anak anak muslim yang ada di Mindanao khususnya anak anak para kelompok Abu Sayyaf. Seperti latar belakang mereka yang kesulitan untuk kehidupannya terutama soal Pendidikan, maka tim Indonesia mencoba menawarkan beasiswa tersebut agar anak anak yang berada di Mindanao dapat bersekolah di Yayasan Sukma yaitu Sekolah Sukma Bangsa di Aceh. Hal ini dilakukan sebagai penawaran negosiasi agar sandraan warga negara Indonesia bisa cepat dibebaskan dengan menukarkan beasiswa yang diberikan kepada anak anak di Mindanao demi mensejahterakan anak anak disana. Agar mampu hidup lebih layak lagi karena banyak para orang tua yang kehilangan pekerjaannya sehingga tidak bisa menyekolahkan anak-anaknya. Sebab pekerjaan Masyarakat disana rata-rata adalah perompak yang melakukan penyanderaan lalu mengancam dengan meminta sejumlah uang.

Mindanao adalah daerah yang memiliki Masyarakat mayoritas orang muslim dan memiliki kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia nya. Tetapi karena masyarakatnya rata rata merupakan kelompok Abu sayyaf yaitu para pemberontak dan hal itu menyebabkan kemiskinan di daerahnya serta banyak kerusakan Pembangunan. Karena negosiasi dan penawaran yang diberikan Indonesia sebagai tindak lanjutnya kelompok Abu Sayyaf akhirnya menyetujui akan penawaran tersebut. lalu dilakukanlah penandatanganan *Memorandum of Understanding* atau yang disebut nota kesepahaman dalam pemberian bantuan Pendidikan dengan Yayasan Sukma. Beasiswa Pendidikan tersebut diberikan untuk 31

anak. Ternyata bantuan pendidikanlah yang memang dibutuhkan oleh para kelompok Abu Sayyaf karena mereka memiliki keterbatasan dalam sarana tersebut di kehidupannya. Pendidikan yang diberikan untuk anak-anak tersebut memiliki waktu hingga 4 tahun serta tambahan sumbangan Al-Quran untuk Masyarakat di Mindanao. Meskipun kelompok Abu Sayyaf merupakan pemberontak tetapi tetap saja mereka membutuhkan Pendidikan yang baik untuk para generasinya. Negosiasi yang dilakukan antar pihak berjalan dengan baik dan membawa hasil Nota kesepahaman yang ditandatangani pada 30 April 2016 dan pembebasan sandera telah menemui hasilnya. Kemudian kesepuluh sandera warga negara Indonesia dibebaskan di Pantai Parang Pulu, Mindanao lalu dibawa oleh Gubernur Sulu ke Zamboanga untuk diperiksa kesehatannya dan diserahkan ke Indonesia secara resmi di Kedutaan Besar Republik Indonesia.

Kelompok Terorisme Abu Sayyaf

Secara terminologi Abu Sayyaf berasal dari Bahasa Arab yang diambil dari kata Abu dan Sayyaf. *Abu* memiliki arti pemegang dan *sayyaf* berarti pedang sehingga makna dari Abu Sayyaf adalah kelompok pembawa pedang. Jika menilik nama kelompok ini, tergambar segerombolan orang membawa pedang dalam mencapai kepentingan dan tujuan mereka yang bertendensi ke arah radikal. Hal tersebut diperkuat dengan pergerakannya yang anarkis dan ekstrem dalam berbagai tindakan yang diambil. Abu Sayyaf merupakan kelompok separatis militer yang berideologikan Islam. Kelompok ini dipimpin oleh Abdurajak Janjalani yang diproklamirkan pertama kalinya pada tahun 1989 yang bersumpah akan membangun negara Islam murni di Filipina yang berlandaskan pada *Salafi Wahabisme* dengan melakukan perjuangan bersenjata (Abuza, 2005). Abdurajak Janjalani adalah putra dari ulama Basilan, Filipina serta seorang alumni dari Universitas Islam di Arab Saudi. Sebelum pendeklarasian Abu Sayyaf, pada tahun 1987 ia pergi ke Libya lalu turut dalam barisan *mujahidin* (pejuang) melawan Uni Soviet di Afghanistan dalam beberapa tahun.

Kelompok Abu Sayyaf memiliki tujuan untuk membangun *Islam Mindanao Islamic State* (MIS) atau negara Islam yang merdeka agar dapat mengimplementasikan syariat Islam dalam hukumnya sebagai landasan undang-undang negaranya (Ghofur, 2016). Diketahui bahwa di Filipina sendiri yang merupakan negara asal kelompok ini, kaum muslim sebagai minoritas menerima ketidakadilan dari pemerintah sehingga melahirkan banyak pergerakan muslim. Diantaranya ialah *Muslim Independent Movement* (MIM), *Moro Islamic Liberation Front* (MILF). Namun, yang membedakan ialah cara juang kelompok-kelompok tersebut, yang mana Abu Sayyaf mengambil cara ekstrem.

Pergerakan kelompok Abu Sayyaf telah menimbulkan keresahan bagi Masyarakat Filipina khususnya dan Asia Tenggara umumnya. Mereka melakukan tindak kekerasan, menculik, mengebom hingga melakukan eksekusi mati terhadap sanderaan jika tak mendapat tebusan sesuai dengan keinginan mereka (Ghofur, 2016). Atas Aksi-aksi tersebut banyak pengamat yang mengelompokkan Abu Sayyaf sebagai kelompok terorisme karena telah menebarkan ketakutan di kalangan masyarakat. Faktanya, Abu Sayyaf terafiliasi dengan kelompok Al-Qaeda yakni kelompok teroris yang berada di bawah pimpinan Osama bin Laden. Abdurrajak Janjalani digunakan untuk memperluas jejaring terorisme Al Qaeda di Asia Tenggara yang kemudian mendirikan sel di Asia Tenggara untuk basis operasi teroris (Abuza, 2005). Selain itu, Osama Bin Laden memberikan dukungan dana kegiatan bagi Abu Sayyaf serta pelatihan keahlian bagi anggota kelompok tersebut. Dari sinilah kemudian Abu Sayyaf dikategorikan sebagai kelompok terorisme selain karena aksinya yang menakutkan.

Aksi terorisme Abu Sayyaf yang mulai melakukan penyerangan pada tahun 1991 banyak ditujukan untuk gereja-gereja Kristen. Aksi lainnya yang dilakukan oleh Abu Sayyaf, diantaranya.

1. Serangan granat pada 4 April 1991 terhadap Kota Zamboanga yang menewaskan dua penginjil Amerika Serikat
2. Pengeboman yang dilakukan pada Agustus 1991 di kapal misionaris Kristen *M/V Doulos*
3. Pembunuhan pendeta Italia Fr. Salvatore Carzedda di Zamboanga pada 20 Mei 1992
4. Penculikan dua biarawati Spanyol di Sulu pada 17 Januari 1993
5. Pengeboman di Zamboanga yang menewaskan 71 orang pada 10 Juni 1994

Seperti halnya peristiwa di atas, aksi Abu Sayyaf semakin meluas hingga ke daerah maritim yang naasnya menimpa ABK Indonesia yang menjadi korban rompak Abu Sayyaf. Abu Sayyaf menghendaki tebusan uang jika ingin para sandera dikembalikan. Motif terorisme maritim ini ialah finansial yang mana untuk menunjang pergerakan Abu Sayyaf.

Peran Antar Aktor Melalui *Peace Building Pyramid*

Teori yang dikemukakan oleh Johan Galtung ini digunakan untuk mengetahui peran aktor yang terlibat dalam pembebasan ABK Indonesia dalam perompakan oleh Abu Sayyaf. Teori ini berbentuk piramida yang membagi keterlibatan aktor dalam tiga tingkatan.

1. *Top elit* yaitu pemegang posisi yang vital dalam masyarakat, seperti pejabat pemerintah, OI, pemimpin politik, atau agama. Dalam kasus ini, yang dapat kita lihat adalah peran pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi. Menlu RI banyak berkoordinasi dengan pemerintah Filipina dan mengutamakan pendekatan *soft*

power untuk membebaskan ABK. Kedua negara ini berkoordinasi untuk menemukan jalan keluar terbaik. Pemerintah Indonesia memiliki opsi untuk memberikan uang tebusan sanderaan sesuai dengan jumlah yang diminta oleh Abu Sayyaf. Namun, opsi tersebut tak akan digunakan oleh pemerintah karena dapat menjadi citra buruk bagi Indonesia yang toleran akan aksi terorisme. Opsi lainnya ialah menggunakan jalur militer jika sudah sangat dibutuhkan. Hal ini tentu harus mendapat izin dari pemerintah Filipina mengingat wilayah yang menjadi tempat sandera berada dalam teritori Filipina. Namun, pemerintah Indonesia juga tak mendapat izin untuk melakukan misi penyelamatan menggunakan militer dari Filipina karena mempengaruhi kredibilitas Filipina. Sehingga jalur negosiasi sangat dikedepankan.

2. *Middle range* adalah tingkat menengah yang mencakup pemimpin yang dihormati di berbagai sektor, pemimpin suku/agama, akademisi/intelektual, dan pemimpin kemanusiaan (NGOs). Dalam kasus ini, level menengah diwakili oleh tim yang dibentuk pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Kivlan Zein seseorang seorang purnawirawan Mayor Jenderal. Ia juga memiliki hubungan saudara dengan Gubernur Sulu sebagai tempat penyanderaan ABK supaya dapat membantu bernegosiasi dengan Abu Sayyaf. Kivlan juga memiliki relasi dengan pemimpin Moro, Nur Maisuari yang turut dilibatkan karena sang penyandera dulunya adalah pengawal Nur. Tim ini berhasil membuka dialog dengan Abu Sayyaf dan melakukan komunikasi secara intens dengan melakukan negosiasi.
3. *Grassroots* adalah tingkat bawah yang melibatkan partisipasi langsung dari masyarakat dalam proses perdamaian suatu konflik. Kelompok ini juga terdiri dari masyarakat luas yang terlibat dalam LSM lokal, komunitas-komunitas, aktivis dan lainnya. Setelah tim yang dibentuk oleh pemerintah berhasil membuka dialog dengan Abu Sayyaf, Indonesia berusaha untuk membangun kepercayaan dan pandangan positif kelompok Abu Sayyaf terhadapnya. Seperti yang diketahui bahwa eksistensi Abu Sayyaf ialah karena adanya ketidakadilan bagi umat Islam di Filipina sehingga mereka ingin mendirikan negara sendiri. Dibandingkan memberikan uang tebusan, Indonesia berupaya untuk melakukan pendekatan sosial ekonomi untuk menarik hati Abu Sayyaf. Wilayah yang ditempati Abu Sayyaf masihlah tertinggal terutama Pendidikan dan Pembangunan yang tak berjalan. Indonesia berinisiatif mengajak tim dari Yayasan Sukma milik Surya Paloh seorang ketua umum partai Nasional Demokrat yang memiliki sekolah di Aceh. Kelompok ini sebagai wakil dari kelompok Masyarakat melakukan pendekatan sosial dengan memberikan

penawaran berupa beasiswa untuk anak-anak muslim yang ada di Mindanao khususnya anak-anak para anggota Abu Sayyaf. Hal ini dilakukan sebagai penawaran negosiasi agar sanderaan warga negara Indonesia bisa cepat dibebaskan dengan memberikan beasiswa yang diberikan kepada anak-anak di Mindanao demi mensejahterakan anak-anak disana. Hasilnya, Abu Sayyaf mau mengembalikan sanderaan dan terjadi penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Abu Sayyaf dan Yayasan Sukma yang akan memberikan beasiswa pendidikan terhadap 31 anak anggota kelompok Abu Sayyaf. Ternyata hal ini juga yang dibutuhkan oleh Abu Sayyaf berupa perhatian terhadap kelompoknya.

Alternative Dispute Resolution (ADR)

ADR adalah penyelesaian konflik menggunakan jalur damai atau *soft*. Jalur ini bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti negosiasi, mediasi, hingga arbitrase. Dalam konflik penyanderaan ini, Indonesia sangat mengedepankan jalur diplomasi dan penyelesaian konflik secara damai dengan tetap berupaya untuk memobilisasi kepentingan para pihak.

Jenis ADR yang dipilih oleh Indonesia adalah negosiasi dengan melibatkan banyak pihak mulai dari aktor pemerintah hingga non pemerintah. Hal ini merupakan upaya Indonesia supaya tetap dalam koridor pembebasan sandera secara damai. Filipina sebagai tempat penyanderaan melalui pemerintahnya juga turut aktif mencari solusi pembebasan dengan berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia melalui Ibu Retno Marsudi. Aktor non pemerintah yang turut dilibatkan juga menjadi angin segar bagi proses negosiasi yang telah dilakukan hingga Abu Sayyaf menerima gagasan Pemerintah Indonesia melalui perwakilannya yakni dari kelompok masyarakat Yayasan Sukma untuk memberikan beasiswa terhadap anak-anak anggota kelompok Abu Sayyaf. Dengan ditandatanganinya sebuah MoU yang menjadi kesepakatan bersama. Pada kasus penyanderaan ABK WNI oleh kelompok terorisme Abu Sayyaf pada tahun 2016, pemerintah Indonesia menggunakan ADR sebagai cara penyelesaian konflik tersebut. Pemerintah Indonesia melakukan negosiasi dengan kelompok terorisme Abu Sayyaf untuk mencapai kesepakatan pembebasan ABK WNI. Negosiasi ini dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator, yaitu pemerintah Filipina. Dalam kasus ini, ADR digunakan karena jalur pengadilan tidak bisa digunakan untuk menyelesaikan sengketa ini.

KESIMPULAN

Abu Sayyaf Group adalah kelompok radikal yang beroperasi di sebagian wilayah Filipina. Kelompok ini sudah banyak melakukan tindakan terorisme yang menimbulkan banyak korban. Salah satu kasusnya adalah melakukan penyanderaan 10 orang anak buah kapal (ABK)

yang mempunyai kewarganegaraan Indonesia. Tentu Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dengan aksi ini. Dalam upaya pembebasan Warga Negara Indonesia yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf, Langkah awal yang digunakan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan meningkatkan hubungan politik dengan pemerintah Filipina. Pemerintah Indonesia tidak menggunakan jalur kekerasan untuk membebaskan para sandera.

Pemerintah Indonesia mengutamakan negosiasi dengan pemerintah Filipina agar mendapatkan izin untuk melakukan operasi penyelamatan secara legal. Hal ini merupakan hal yang sangat penting mengingat lokasi penyanderaan diperkirakan berada di wilayah selatan atau barat daya Filipina, dimana keamanan belum sepenuhnya dikendalikan oleh Pemerintah Filipina. Kompleksitas dari kasus ini menyebabkan Pemerintah Indonesia merasa tidak cukup jika hanya mengandalkan pemerintah Filipina oleh karena itu pemerintah Indonesia melibatkan aktor pemerintah.

Adapun peran dari aktor lain yang dapat dilihat melalui *Peace Building Pyramid* seperti masyarakat, pemerintah, OI, dan juga pemimpin politik. Penyelesaian dari konflik ini juga menggunakan jalur damai atau soft. Dalam konflik ini pemerintah Indonesia mengedepankan jalur negosiasi dengan melibatkan banyak pihak mulai dari aktor pemerintah hingga non pemerintah. Seperti Pemerintah Filipina sebagai pihak ketiga yakni Mediator. Pemerintah Indonesia menggunakan penyelesaian konflik dengan jalur tersebut karena jalur pengadilan tidak bisa digunakan dalam menyelesaikan sengketa ini.

Ada juga beberapa pendekatan yang dilakukan oleh Indonesia. Pendekatan yang dilakukan oleh Indonesia adalah pendekatan politik, sosial dan ekonomi. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga memulai pendekatan lain dengan memberikan beasiswa kepada anak-anak Mindanao. Strategi berbasis budaya ini diterapkan mengingat mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam dan terdapat negosiasi yang sedang berlangsung dengan komunitas Muslim di Mindanao untuk menjaga komunikasi yang diperlukan. Terbukti dengan beberapa pendekatan tersebut dan juga negosiasi yang keras dari kemenlu Indonesia yang melibatkan beberapa pihak seperti Pemerintah Filipina, tim Yayasan Sukma dapat membebaskan para sandera dari kelompok Abu Sayyaf.

DAFTAR REFERENSI

- Abuza, Z. (2005). Balik-Terrorism: The Return Of The Abu Sayyaf (Issue September). <http://www.carlisle.army.mil/ssi%0ATo>
- Dewi, P. R. K. (2020). Strategi Diplomasi Indonesia Dalam Pembebasan 10 Abk Wni Dari Kelompok Abu Sayyaf Tahun 2016. *Juli*, 1–22. <https://erepo.unud.ac.id/id/eprint/2150/>

- Ghofur, A. (2016). Dinamika Muslim Moro di Filipina Selatan dan Gerakan Sparatis Abu Sayyaf. *Sosial Budaya*, 13(2), 175–188.
- Gumilang, P. (2016). *Ryamizard Sebut Filipina Segera Bebaskan Sandera Abu Sayyaf*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/tag/debat-cawapres>
- Maiese, M. (2017). *Levels of Action (Lederach's Pyramid)*. Beyond Intractability. https://www.beyondintractability.org/essay/hierarchical_intervention_levels
- Pujayanti, A. (2016). Upaya Pembebasan Wni Sandera Kelompok Abu Sayyaf. *Info Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 8(7), 2009–2012.
- Ramadhan, I., & Ridwan, M. (2020). *Terorisme Dan Jihad Tinjauan Hukum Dan Sosial Keagamaan* (1st ed.). Pustaka Pelajar.
- Tim Hukumonline. (2023). *Terorisme: Pengertian, Faktor Penyebab, dan Jenis-Jenisnya*. Hukum Online,Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/terorisme-adalah-1t6183b09848f15/>
- Triana, N. (2019). *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsultasi)*.
- Wahyudi, A. (2015). Konflik, Konsep Teori Dan Permasalahan. *Jurnal Publiciana*, 8(1), 1–15.